DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adjie, Habib, 2014, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung.

Adjie, Habib dan Muhammad Hafidh, 2016, *Memahami: Majelis Kehormatan Notaris (MKN)*, Sinergi Offset, Jakarta.

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta.

Dwidja, Priyatno & Kristian, 2020, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Ditinjau dari Konsep, Pendapat Para Ahli, Pertimbangan Hakim, dan Yurisprudensi*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Effendi, Rusli, Achmad Ali, & Poppy Andi Lolo, 1991, "*Teori Hukum*", Pers Universitas Hassanuddin, Makassar.

Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Kansil, C.S.T., 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Kohar, A., 1983, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung.

Lumban Tobing, G.H.S., 1999, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 2019, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

Notodisoerjo, R. Soegondo, 2019, *Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Priyatno, Muladi & Dwidja, 2010, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Cet-IV, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Rahardjo, Satjipto, 2019, *Ilmu Hukum di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum: Mencari, Memahami, dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.

Shidarta dan Petrus Lakonawa, 2018, *Lex Specialis Derogat Legi Generali: Makna dan Penggunaannya*, Penerbit BINUS University, Jakarta.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Pengantar Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 2019, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Subekti & R. Tjitrosoedibio, 1979, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Subekti, R., 2005, *Hukum Pembuktian*, Cet. 15, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sugiyono, 2019, *Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*, ALFABETA, Bandung.

Suhartono, 2011, *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara*, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Syahrani, Riduan, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Yani, Ahmad, 2020, *Konsep Beneficial Owner dalam Hukum Perusahaan Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Jurnal

Alfiansyah, Anang, 2019, Peran Majelis Kehormatan Notaris Terhadap Terbukanya Rahasia Jabatan Notaris Dalam Menjalankan Jabatan Publik, Otentik's: *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 10.

Agustina, Shinta, 2018, "Implementasi Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 44, No. 4, hlm. 504.

Irawan, Sandra, 2022, "Kedudukan Notaris Dalam Pembuktian Suatu Perkara", *PAULUS Law Journal*, Vol. 4, No. 1, hlm. 38.

Istiyaningsih, 20221, "Kepastian Hukum dalam Pelaporan Beneficial Owner oleh Notaris," *Jurnal Notariat*, Vol. 6, No. 1, hlm. 76-95.

Lawrence, Vellichia, 2021, "Analisis Yuridis Kedudukan Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Dalam Pembuatan Akta Notaris", *Jurnal Perspektif Hukum*, Vol. 2, No. 1, hlm. 15-25.

Mathar, Ahmad, 2023, "Sanksi Dalam Peraturan Perundang-Undangan", *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 3, Edisi II, hlm. 45.

Nurwahjuni, Yuniarti, Felia Ramadhanty Waluyo, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Menerapkan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Terhadap Keterangan yang Didapatkannya Dalam Pembuatan Akta, *Notaire*, Vol.7, No.3, Hlm. 445-462.

Pol, Ronald F., 2020, "Anti-money laundering: The world's least effective policy experiment? Together, we can fix it", *Policy Design and Practice*, Vol. 3, Issue 1, hlm. 73-94.

Putro Indarto, Bimo Kusumo, 2024, "Pertanggungjawaban Notaris Dalam Mengungkapkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) Pada Pendirian Perusahaan", *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 1, No. 4, hlm. 199-206.

Razi, Fatrul, Rembrandt, & Yussy Adelina Mannas, 2023, "Kepastian Hukum Prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Serta Peranan Notaris Berdasarkan Permenkumham Nomor 15 Tahun 2019", *Unes Law Review*, Vol. 5, No. 4, hlm. 4699-4700.

Sinaga, N.A., 2019, "Transparansi Beneficial Owner dalam Pencegahan TPPU", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 49, No. 2, hlm. 444-458.

Sinuhaji, Sylvia Vietressia, Sunarmi, Mahmul Siregar, & Suprayitno, 2024, "Pertanggungjawaban Notaris Melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) Suatu Perseroan Terbatas Kepada Kemenkumham Melalui Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU Online)", *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendekia*, Vol. 1, No. 9. Hlm 4646-4659.

Yalid dan Birman Simamora, 2021, "Konflik Norma Kewajiban Notaris Merahasiakan Akta dengan Kewajiban Melaporkan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan," *Era Hukum Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 19, No. 2, hlm. 16-39.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Perseroan Terbatas Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata.

D. Sumber Internet

Apa Itu Perkumpulan, https://virtualofficescbd.id/blog/apa-itu-perkumpulan, diakses pada 5 Februari 2025.

Financial Action Task Force, “FATF Guidance Transparency and Beneficial Ownership, http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Guidance-transparency-beneficial-ownership.pdf. diakses pada 2 Februari 2025.

Pengertian Persekutuan Firma Beserta Karakteristik dan Pendirianannya, https://katadata.co.id/berita/nasional/62183fd24fbf8/pengertian-persekutuan-firma-beserta-karakteristik-dan-pendiriannya. Diakses pada 5 Februari 2025.

Persekutuan Komanditer, https://www.hukumonline.com/berita/a/persekutuan-komanditer-lt61eaa31f481e3/?page=2, diakses pada 5 Februari 2025.

PPATK, "Profil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)," dari https://www.ppatk.go.id/home/menu/2/profile.html. Diakses ada 05 Februari 2025